

RINGKASAN EKSEKUTIF

KERJA SAMA LUAR NEGERI INDONESIA

DALAM PENANGGULANGAN

TERORISME

2018

Peneliti:

Simela Victor Muhamad, Poltak Partogi Nainggolan, dan Sita Hidriyah

PUSAT PENELITIAN

BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JAKARTA

Memasuki awal 2018, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI telah menyiapkan berbagai langkah strategis dan fokus pada politik luar negeri Indonesia, diantaranya adalah memperkuat persatuan dan sentralitas ASEAN (antara lain dengan mendukung upaya ASEAN dan China dalam menjaga stabilitas dan keamanan Laut China Selatan), meningkatkan diplomasi perdamaian dan kemanusiaan bagi dunia yang lebih damai dan stabil, serta memperkuat diplomasi dalam memerangi kejahatan lintas batas, termasuk perdagangan manusia, *IUU Fishing*, kejahatan obat-obatan terlarang, radikalisme, dan terorisme. Sejumlah langkah strategis yang disiapkan Kemenlu RI tersebut sudah tentu didasari oleh kepentingan nasional Indonesia, sebagai bagian dari masyarakat internasional, yang sudah seharusnya peduli pada upaya pemeliharaan stabilitas keamanan dan perdamaian internasional, diantaranya dengan memperkuat diplomasi dan kerja sama antarnegara dalam penanggulangan terorisme.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa aksi terorisme hingga kini masih menjadi keprihatinan internasional dan perlu untuk terus diwaspadai, karena bukan tidak mungkin aktivitas terorisme yang mewarnai belahan dunia di tahun 2017 dan di tahun-tahun sebelumnya, akan kembali terjadi jika tidak ada upaya bersama dari masyarakat internasional untuk menanggulangnya. Di sepanjang tahun 2017, setidaknya telah terjadi tujuh aksi terorisme “mematikan” di berbagai kawasan dunia yang mengakibatkan ratusan jiwa manusia menjadi korban. Meski tidak pernah memperlihatkan bukti, ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) mengklaim bertanggung jawab atas sebagian besar aksi teror tersebut, sehingga ada yang berpandangan bahwa kelompok radikal ini sebagai organisasi teroris.

Dikaitkannya ISIS dengan terorisme sepertinya sulit dihindari jika memerhatikan gerakan kelompok radikal ini di Irak dan Suriah yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam mencapai tujuan politiknya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kemudian ISIS dikenal sebagai kelompok radikal yang paling disorot dan sering dikaitkan dengan aksi terorisme yang terjadi di berbagai kawasan dunia. Hal itu juga tidak lepas dari pengakuan mereka sendiri yang menyatakan terlibat. Keterlibatan dan pengaruh ISIS dengan berbagai aksi terorisme bisa menjadi ancaman bagi stabilitas keamanan di suatu kawasan, dan hal itu sudah terlihat dalam konflik di Marawi, Filipina, pada tahun 2017 lalu.

Belajar dari konflik di Marawi, yang dilatarbelakangi oleh adanya keterkaitan dengan kelompok radikal ISIS (yang pengaruhnya begitu luas), dan berbagai aksi terorisme lainnya di berbagai kawasan dunia di mana para pelakunya merupakan aktor non-negara dan banyak diantaranya memiliki jejaring lintas batas, maka upaya untuk menanggulangi terorisme tidak cukup dilakukan hanya oleh satu negara. Pengaruh dan jejaring teroris di era modern saat ini, sebagaimana dikemukakan Sekjen PBB, Antonio Guterres, sudah sedemikian luas, melintasi banyak negara, dengan ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap perdamaian, keamanan, dan pembangunan internasional.

Adanya keterkaitan antara aksi terorisme yang terjadi di Indonesia dengan kelompok teroris di luar negeri menunjukkan bahwa terorisme telah menjadi persoalan lintas negara, dan hal itu juga terlihat dalam beberapa aksi terorisme di negara lain, di mana kasusnya tidak berdiri sendiri tetapi juga ada kaitannya dengan jejaring teroris di luar negeri. Kasus Marawi di Filipina, sekali lagi, menjadi contoh adanya keterkaitan itu, dan oleh karena itu Indonesia, yang sudah beberapa kali menghadapi aksi terorisme, perlu membangun kerja sama dengan negara-negara lain dalam menanggulangi terorisme yang bersifat lintas negara itu. Kerja sama tersebut sudah tentu tidak saja ditujukan untuk kepentingan keamanan Indonesia semata, tetapi juga untuk kepentingan stabilitas keamanan di kawasan.

Bagi Indonesia, yang berada di Asia Tenggara, kerja sama tersebut dilakukan antara lain melalui kerja sama secara bilateral atau trilateral dengan negara-negara sesama anggota ASEAN yang berbatasan, untuk menangani atau untuk mengantisipasi persoalan terorisme agar tidak berkembang di dalam negeri dan meluas di kawasan. Indonesia, sebagai negara tetangga dan berbatasan dengan Filipina, tidak bisa abai terhadap situasi yang terjadi di Marawi, di mana konflik bersenjata yang terjadi di sana ditengarai ada keterkaitannya dengan kelompok radikal ISIS. Menurut Kepala BNPT, setelah ISIS di Suriah hancur, banyak anggotanya yang menyeberang ke Indonesia. Ada juga simpatisan ISIS di Indonesia yang ingin berperang ke Marawi karena daerah konflik selalu menjadi “medan magnet” (tempat yang menarik) bagi mereka untuk berjihad.

Untuk mencegah terjadinya penyusupan lewat laut oleh simpatisan ISIS ke Marawi, Indonesia dan Filipina sepakat bekerja sama untuk menghentikan ancaman itu. Kepolisian Filipina sempat merilis sejumlah nama WNI yang diduga terlibat kasus penyerangan di Marawi, di antaranya adalah Anggara Suprayogi, Yayat Hidayat Tarli, Al Ikhwan Yushel, Yoki Pratama Windyarto, Mochammad Jaelani Firdaus, dan Muhammad Gufron. Sementara itu, 17 WNI lainnya yang sempat terjebak di Marawi ketika berdakwah di daerah tersebut telah dievakuasi dan dipulangkan ke Indonesia. Berdasarkan keterangan aparat keamanan Filipina, ketujuhbelas WNI yang melakukan kegiatan dakwah tersebut tidak mempunyai misi lain di negara itu.

Adanya sejumlah WNI yang diduga terlibat dalam konflik bersenjata di Marawi menimbulkan dugaan bahwa pasca-kekuatan ISIS di Suriah menurun, banyak orang Indonesia yang pergi ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS, dalam perjalanannya kembali ke Indonesia mereka singgah di Filipina, sehingga timbul anggapan bahwa ISIS mengirim mereka untuk bertempur di Marawi. Hal tersebut kemudian menimbulkan kecurigaan di kalangan pejabat Filipina bahwa sejumlah warga Indonesia, dan juga Malaysia, yang diduga berafiliasi dengan ISIS membantu kelompok-kelompok pemberontak dalam pertempuran melawan pemerintah Filipina. Dijumpainya warga Indonesia, dan juga Malaysia, yang kembali dari Suriah dalam aktivitas pemberontakan di Filipina, selain karena faktor ideologis, juga karena kehidupan

sosial dan kondisi alam di Filipina, khususnya di bagian selatan, dianggap lebih cocok oleh mereka yang berasal dari Indonesia dan Malaysia.

Dari kasus Marawi terlihat bahwa kerja sama bilateral antara Indonesia dan Filipina, bahkan secara trilateral dengan melibatkan Malaysia, menjadi suatu keharusan, terutama untuk mencegah agar persoalan yang terjadi di Marawi tidak meluas ke Indonesia dan Malaysia, dan juga kawasan, selain tentunya untuk membantu Filipina agar persoalan yang terjadi di Marawi dapat teratasi. Posisi ketiga negara yang saling berbatasan dengan wilayah perairannya yang terbuka dan berpulau-pulau, ditambah dengan jumlah dan kapasitas aparat keamanan yang terbatas, telah dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan lintas negara, termasuk pelaku aksi teror, untuk mengembangkan aksinya. Hal inilah yang perlu terus diwaspadai dan diantisipasi oleh Indonesia, Filipina, dan juga Malaysia, tidak saja untuk menghadapi kasus Marawi, tetapi juga untuk menghadapi potensi ancaman keamanan lainnya, termasuk terorisme.

Atas dasar kepentingan itulah, terutama dalam rangka menghadapi tantangan keamanan di perairan perbatasan, Indonesia bersama dengan Malaysia dan Filipina secara resmi pada 19 Juni 2017 memulai kegiatan kerja sama patroli maritim terkoordinasi trilateral (*Trilateral Maritime Patrol Indomalphi*). Kegiatan patroli maritim trilateral ini diresmikan oleh Menteri Pertahanan ketiga negara, yaitu Ryamizard Ryacudu (Indonesia), Dato Seri Hishammuddin Tun Hussein (Malaysia), dan Delfin N. Lorenzana (Filipina) di Tarakan, Kalimantan Utara. Turut hadir dalam kesempatan itu Panglima Angkatan Bersenjata dari Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Peresmian yang ditandai dengan demonstrasi *Indomalphi Quick Response, Sailing Pass* (yang melibatkan kapal perang dari ketiga negara), dan *Flying Pass*, dihadiri pula oleh perwakilan dari Singapura dan Brunei Darussalam sebagai observer.

Peluncuran patroli maritim trilateral ini, sebagaimana dikemukakan Menteri Pertahanan RI dalam sambutannya, dapat menjadi garis awal dan momentum bersejarah untuk ketiga negara dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja sama pertahanan di masa yang akan datang dalam rangka mewujudkan stabilitas keamanan di kawasan. Hal serupa dikemukakan Menteri Pertahanan Malaysia, yang antara lain juga menegaskan bahwa ketiga negara memiliki kemauan politik, kesungguhan dan saling kepercayaan untuk bekerja sama dalam menghadapi musuh bersama, yakni ancaman terorisme.

Khusus dengan Filipina, kegiatan patroli maritim dilaksanakan melalui Patkor Philindo, untuk menjaga keamanan perairan Filipina dan Indonesia. Untuk tahun 2017, dengan sandi Philindo XXXI, patroli terkoordinasi tersebut dilaksanakan pada tanggal 4 sampai dengan 12 Juli 2017. Patroli terkoordinasi yang dilaksanakan setiap tahun ini, selain bertujuan untuk menjaga keamanan perairan Filipina dan Indonesia, juga sekaligus untuk meningkatkan pemahaman bersama dalam penindakan terhadap pelanggaran di laut sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) dan kesepakatan bersama. Selain itu juga merupakan sarana untuk saling

belajar antara kedua angkatan laut dan menjadi bagian dari peningkatan kerja sama kedua negara. Tidak cukup dengan kegiatan patroli bersama, kerja sama juga dilakukan melalui pertukaran informasi intelijen di antara Angkatan Laut kedua negara (*Intelligence Exchange Between the Indonesian Navy and the Philippine Navy*), yang dilaksanakan setiap tahun.

Di luar kegiatan berkala, sebagai bagian dari kerja sama bilateral, kedua negara juga melaksanakan kegiatan *port visit*, khususnya antara TNI AL dan *Naval Force East Mindanao* (NFEM). Kegiatan yang dilaksanakan secara fleksibel dari segi waktu ini, secara tidak langsung akan memberi efek gentar (*deterrence effect*) kepada para pelaku kejahatan lintas negara, karena kapal-kapal angkatan laut tersebut melintas di perairan perbatasan. Di akhir Oktober 2017, dua kapal *corvet* TNI AL (KRI Sultan Hasanuddin dan KRI Sultan Iskandar Muda), dengan masing-masing membawa sekitar 100 pasukan, berlabuh di General Santos City (Gensan). Kehadiran kapal-kapal TNI AL di Gensan, meskipun konflik bersenjata di Marawi saat itu sudah berakhir, menjadi penanda bahwa Indonesia menaruh perhatian pada upaya menjaga keamanan perairan kawasan, atau setidaknya Indonesia bersama dengan Filipina (yang menyambut baik kunjungan dua kapal *corvet* TNI AL di Gensan) berkepentingan untuk terus mewaspadaikan potensi ancaman keamanan di Filipina Selatan, terutama ancaman terorisme.

Untuk memperkuat kerja sama dengan Filipina, pada 10 Agustus 2017 BNPT melakukan nota kesepahaman dengan Filipina untuk membentuk kerangka kerja dalam mengatasi gangguan keamanan, khususnya dalam mencegah, menekan, dan memerangi terorisme internasional dan kejahatan lintas negara. Tujuan perjanjian Indonesia-Filipina ini untuk meningkatkan kerja sama penanggulangan terorisme dengan aparat keamanan, pertahanan, intelijen dan badan-badan penegak hukum dari kedua negara. Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran nota kesepahaman Indonesia-Filipina ini juga dilatarbelakangi oleh peristiwa yang terjadi di Kota Marawi. Pasalnya, pertempuran yang terjadi di Kota Marawi saat itu telah menjadi kekhawatiran negara-negara ASEAN, terutama dengan hadirnya kelompok bersenjata yang mengaku berkiblat kepada ISIS yang bisa mengancam keamanan kawasan.

Bulan Oktober 2017, Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengumumkan pertempuran di Kota Marawi berakhir, menyusul terbunuhnya Isnilon Hapilon, pemimpin Abu Sayyaf yang didukung ISIS di Asia Tenggara dalam sebuah operasi militer oleh pasukan tentara Filipina. Keberhasilan pasukan Filipina menumpas pemberontakan di Marawi, segera diantisipasi oleh Indonesia dengan memperketat pengawasan di wilayah perbatasan, seperti yang dilakukan oleh aparat di Sulawesi Utara dan Maluku Utara, yang wilayah perairannya tidak jauh dari wilayah Filipina. Aparat memperketat pengawasan dengan menambah pasukan di wilayah-wilayah rawan penyusupan (termasuk meningkatkan patroli maritim), meningkatkan peran Tim PORA, dan menggalang masyarakat di daerah pesisir dengan menghimbau untuk secepatnya melaporkan jika mengetahui adanya warga baru. Langkah antisipasi juga dilakukan dengan

memperkuat koordinasi antara-instansi terkait guna meningkatkan pengawasan terhadap WNI/WNA yang masuk/keluar wilayah Sulawesi Utara dan Maluku Utara.

Mengacu pada posisi Sulawesi Utara yang berdekatan dengan wilayah Filipina, maka potensi ancaman terorisme di Sulawesi Utara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Sulawesi Utara dijadikan tempat transit oleh anggota teroris pasca-melakukan aktivitasnya/pelatihan di Indonesia dan kembali ke Filipina;
- 2) Sulawesi Utara dijadikan jalur lintas batas/jalur penyelundupan barang berupa senjata api/bahan peledak yang dibawa oleh para pelaku dari dan ke Filipina;
- 3) Sulawesi Utara selain dijadikan jalur pelarian para pelaku teror ke Filipina juga menjadi tempat persembunyian sementara bagi para pelaku teror/aksi teror pasca-melakukan sejumlah aksi teror di sejumlah daerah di Indonesia;
- 4) Sulawesi Utara selain menjadi jalur pelintasan dan persinggahan pasca-pelaksanaan pelatihan militer di beberapa wilayah di Indonesia, juga dijadikan jalur kegiatan penyelundupan senjata api dan bahan peledak;
- 5) Sulawesi Utara merupakan daerah yang menjadi sasaran/target pelaku aksi teror.

Oleh karena itu, untuk mengantisipasi ancaman terorisme masuk ke Indonesia, khususnya melalui Sulawesi Utara yang berbatasan dengan Filipina, pihak TNI, khususnya TNI Angkatan Laut (Lantamal VIII) melakukan:

- 1) Koordinasi dengan pihak imigrasi maupun instansi lainnya guna meningkatkan pengawasan terhadap WNI/WNA (khususnya Warga Negara Filipina) yang masuk/keluar wilayah Sulawesi Utara dari dan ke Filipina melalui jalur laut di *Border Crossing Station* (BCS) Marore/Miangas serta pengawasan dan pemantauan di area BCS Marore dan Miangas terhadap WNA (Filipina) maupun yang dicurigai;
- 2) Membentuk Tim *Eastern Fleet Quick Respons* (EFQR) dan penambahan Satgas Intelijen guna meningkatkan operasi intelijen dengan melakukan pengawasan wilayah kelautan dan dan pelabuhan tikus (seperti di Tinakareng) maupun lainnya, terutama lokasi yang patut dicurigai sebagai tempat persembunyian dan latihan perang para kombatan ISIS serta melakukan razia bahan-bahan kimia yang berpotensi bisa dijadikan bom;
- 3) Meningkatkan patroli maritim dan penambahan KRI serta kapal pemerintah lainnya dilaut guna mencegah masuknya kelompok militan ISIS atau yang dicurigai melalui jalur laut;
- 4) Memperkuat pengawasan dan pengamanan di perbatasan termasuk akses masuk dan keluar, baik secara legal maupun ilegal dari dan ke Filipina serta mencari pelaku sesuai data yang ada untuk mencegah sasaran masuk yang tidak diketahui oleh aparat keamanan. Langkah ini tampaknya membuahkan hasil ketika pada 11 November 2017, Tim Intel EFQR Lantamal VIII dan Satgas Trisula-17 melakukan penangkapan dan pemeriksaan atas nama Diki Maenaki (Abu Mushab) di dalam kapal cepat Express Bahari 2 rute Manado-Tahuna,

yang mana merupakan simpatisan ISIS dengan tujuan melakukan perjalanan menuju Filipina melalui jalur laut dari Manado, yang rencananya akan ke Tahuna dan menuju Filipina untuk bisa bergabung dengan jaringan ISIS lainnya.

Langkah antisipasi TNI AL di atas diperkuat dengan sejumlah program kerja yang mencakup:

- 1) Operasi penegakan hukum, pencegahan dan kegiatan *Counter Terrorism* serta deradikalisasi bersama kementerian lembaga serta Pemerintah Daerah;
- 2) Membentuk Posko terpadu dalam rangka mengantisipasi aksi terorisme di kalangan masyarakat dan masuknya kelompok militan pendukung ISIS dari Filipina;
- 3) Melaksanakan operasi intelijen untuk deteksi dini dan cegah dini di wilayah perbatasan dan melakukan langkah-langkah antisipasi terhadap masuknya kelompok-kelompok teroris di beberapa wilayah perbatasan Indonesia-Filipina;
- 4) Mengintensifkan dan meningkatkan alat sista dengan menambahkan jumlah KRI diperairan wilayah perbatasan untuk melaksanakan patroli maritim dengan meningkatkan pengawasan terhadap kapal-kapal asing, warga Indonesia/warga Filipina yang dicurigai masuk atau berada di wilayah Sulawesi Utara (Indonesia), pengawasan WNI yang kembali ke Tanah Air dari Filipina, dengan maksud mencegah masuknya kelompok militan ISIS atau yang dicurigai masuk melalui jalur laut/pelabuhan;
- 5) Memperketat BCS Marore/Miangas terhadap warga Indonesia/warga Filipina dari dan ke Filipina serta pengawasan terhadap warga Filipina di area BCS;
- 6) Pemantapan dan penggalangan dari pos-pos di masyarakat untuk bisa melakukan *Early Warning System* dengan melaporkan secepatnya kepada aparat keamanan, apabila menemukan hal-hal yang mencurigakan; dan
- 7) Pengajuan penambahan BCS atau Pos TNI AL (Posal) atau Pos Terpadu di pulau-pulau terluar yang diindikasikan masih banyak dilalui oleh para warga Filipina, maupun pelintas batas lainnya. Posal, lini terdepan dari pangkalan TNI AL, merupakan kepanjangan tangan, mata dan telinga dalam melaksanakan fungsi pengamatan dan pengamanan.

Langkah antisipasi juga dilakukan oleh aparat keamanan di Provinsi Maluku Utara, yang secara geografis berhadapan dengan wilayah perairan terbuka di sisi utara (Samudera Pasifik), yang juga berpotensi disusupi oleh jaringan teroris. Masyarakat di Provinsi Maluku Utara, khususnya di wilayah Halmahera dan Morotai, pada pertengahan 2017 sempat dihantui kekhawatiran daerahnya akan dijadikan sarang atau basis teroris. Kekhawatiran itu dipicu adanya pengakuan salah seorang teroris yang berhasil diamankan Densus 88 Mabes Polri di Banten bahwa mereka akan menjadikan Pulau Halmahera sebagai basis pelatihan anggota kelompoknya. Kemungkinan wilayah Maluku Utara, khususnya Halmahera menjadi basis teroris bukan sesuatu yang mustahil, karena wilayah ini memiliki kondisi geografis yang sangat

mendukung bagi keberadaan kelompok teroris. Masyarakat Maluku Utara tidak menginginkan daerahnya seperti Poso, Sulawesi Tengah yang selama bertahun-tahun dicekam ketakutan akibat adanya keelompok teroris di wilayah itu, yang tidak jarang melakukan tindak pembunuhan terhadap warga setempat.

Sehubungan dengan hal tersebut, aparat keamanan/pertahanan yang bertugas di Maluku Utara, termasuk TNI Angkatan Udara yang berbasis di Morotai (Lanud Leo Wattimena), telah melakukan pemetaan terhadap kemungkinan keberadaan jaringan teroris yang ada di Maluku Utara, serta jalur-jalur penyeberangan terdekat yang memungkinkan menjadi jalur masuk jaringan teroris dari luar. Hasil pemetaan TNI AU menjelaskan bahwa Maluku Utara memiliki kerawanan yang cukup tinggi sebagai sasaran terorisme, dan hal tersebut dapat dilihat dari kondisi wilayah yang sangat strategis, antara lain:

- 1) Dikelilingi 3 pusat kegiatan terorisme, yaitu Mindanao (pusat pelatihan), Poso (pelatihan medan jihad), Ambon (medan jihad);
- 2) Pulau Halmahera dan Taliabu merupakan salah satu daerah yang diincar sebagai pengganti Poso;
- 3) Pengawasan laut kurang optimal karena keterbatasan sarana dan prasarana. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya kasus nelayan Filipina;
- 4) Masih banyaknya pelabuhan "tikus" (tidak resmi) dan pulau terpencil yang tidak terawasi;
- 5) Pengawasan terhadap orang asing terutama yang masuk secara ilegal kurang optimal, akibat dari banyaknya jalur-jalur yang tidak terawasi.

Terkait dengan konflik Marawi yang terjadi di Filipina Selatan, pihak TNI AU (Lanud Leo Wattimena) berpandangan bahwa wilayah Maluku Utara sangat memungkinkan dijadikan tempat pelarian/persembunyian terutama di wilayah Pulau Morotai, karena merupakan daerah terluar perbatasan terdekat dengan Filipina, selain banyaknya pulau-pulau kecil tidak berpenghuni dan masih terbatasnya infrastruktur pengawasan wilayah laut. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi masuknya kelompok teroris, terutama kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan ISIS dari Marawi (Filipina), aparat keamanan TNI dan Polri memperketat pengawasan dengan menambah pasukan di wilayah-wilayah rawan penyusupan, meningkatkan peran Tim PORA, dan menggalang masyarakat di daerah pesisir (termasuk di area Lanud dengan menghimbau kepada masyarakat untuk secepatnya melaporkan jika mengetahui adanya warga baru). Hal serupa dilakukan oleh pihak kepolisian, melalui berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan, agar masyarakat memiliki tanggung jawab untuk ikut mengamankan wilayahnya dari ancaman terorisme.

Memerhatikan wilayah perairan Maluku Utara yang cukup terbuka dan posisinya bisa langsung ke perairan internasional, termasuk menjadi jalur dari dan ke wilayah Filipina (meski medan gelombang lautnya tidak mudah dilalui), tidak berlebihan pula jika dalam kerangka kerja

sama bilateral dengan Filipina, keamanan di sekitar perairan Maluku Utara juga perlu mendapat perhatian kedua negara. Setidaknya, aparat keamanan dari masing-masing negara (Indonesia dan Filipina) melakukan langkah-langkah pengamanan di wilayah perairan perbatasan masing-masing sesuai wilayah yurisdiksinya, dan selalu berkoordinasi jika dijumpai persoalan yang mengancam keamanan mereka.

Kerja sama internasional dalam penanggulangan terorisme sudah tentu juga dilakukan Indonesia dalam kerangka ASEAN. Peristiwa 9/11 menyebabkan perubahan mendasar dalam cara ASEAN menangani terorisme. Pada *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC)* ketiga, 11 Oktober 2001, di Singapura, para menteri negara anggota ASEAN menyatakan dalam *joint communique* bahwa upaya dalam memerangi kejahatan transnasional harus memiliki fokus pada terorisme. Pada bulan Mei 2002, ASEAN menghasilkan *Work Program to Implement the Plan of Action to Combat Transnational Crime*, yang didalamnya disusun seperangkat mekanisme dan strategi untuk mengatasi kejahatan transnasional di tingkat regional, termasuk di dalamnya adalah terorisme.

ASEAN sejak tahun 2002 telah berkonsentrasi untuk melakukan pembentukan kerangka kerja hukum regional untuk menyelaraskan undang-undang anti terorisme nasional sebagai dasar untuk melakukan kerja sama antarnegara. Pencapaian utama ASEAN dalam kampanye perang melawan terorisme adalah dideklarasikannya *ASEAN Convention on Counter Terrorism* tahun 2007. Konvensi ini mengikat negara-negara anggota ASEAN dalam komitmennya untuk melakukan perang melawan terorisme.

Pencapaian utama ASEAN dalam kampanye perang melawan terorisme adalah dideklarasikannya *ASEAN Convention on Counter Terrorism* tahun 2007. Dipicu oleh aktivitas teroris di Marawi, Filipina, pada tahun 2017, enam negara ASEAN (yang meliputi Indonesia, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, dan Singapura) pada tanggal 25 Januari 2018 di Bali meluncurkan pakta kerja sama intelijen, yang bernama *Our Eyes Initiatives*, untuk melawan terorisme berbasis radikalisme dan ekstrimisme di kawasan. Inisiatif *Our Eyes* diluncurkan untuk memudahkan enam negara ASEAN bertukar informasi strategis, salah satunya tentang keberadaan dan pergerakan kelompok militan.

Kerja sama luar negeri Indonesia dalam penanggulangan terorisme, juga dilakukan dengan negara-negara di luar ASEAN, salah satunya adalah dengan Australia. Kerja sama ini didasari atas kesadaran yang sama dalam melihat aktivitas terorisme sebagai kejahatan lintas batas negara sebagai ancaman serius bagi keamanan nasional dan kestabilan kedua negara. Kerja sama Indonesia dan Australia semakin intens setelah peristiwa Bom Bali I, 12 Oktober 2002, yang menewaskan 202 orang, 88 orang diantaranya warga negara Australia. Mengakui akan kebutuhan untuk memperkuat kerja sama internasional pada semua tingkatan dalam

memerangi terorisme secara komprehensif, pada 21 Desember 2015, Indonesia dan Australia menandatangani MoU tentang Pemberantasan Terorisme Internasional.

Kerja sama Indonesia dan Australia, dan juga dengan negara-negara ASEAN lainnya, dalam penanggulangan terorisme semakin diperkuat pasca-kasus Marawi di Filipina, antara lain dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan masuknya teroris asing (*Foreign Terrorist Fighters/FTF*) ke kawasan yang diduga berasal dari jaringan ISIS. Komitmen Indonesia dan Australia untuk menjaga stabilitas kawasan dikemukakan kembali oleh kedua pihak pada pertemuan bilateral 2+2 ketiga di Sydney, Australia, 16 Maret 2018. Dalam pertemuan ini, Indonesia dan Australia sepakat memperkuat pertahanan, termasuk memerangi terorisme. Salah satu hal yang perlu diantisipasi oleh Indonesia dan Australia terkait ancaman terorisme ini adalah bahaya kombatan perang Irak dan Suriah yang kembali ke negara asal, dan oleh karenanya untuk menangani ini pertukaran data intelijen menjadi hal penting.

Sebagai simpulan, kerja sama internasional dalam penanggulangan terorisme bagi Indonesia menjadi sebuah kebutuhan dan tidak terelakkan, mengingat fenomena terorisme sudah bersifat lintas batas. Kerja sama tersebut dapat dilakukan secara bilateral, trilateral, atau multilateral seperti melalui ASEAN, dengan memerhatikan kebutuhan negara-negara yang melakukan kerja sama itu, agar kerja sama dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bersama. Kerja sama memerangi dan memberantas terorisme di kawasan tidak cukup dengan mengeluarkan seruan atau deklarasi, tetapi juga harus diikuti dengan langkah-langkah konkret melalui program kerja sama yang diimplementasikan, terutama kerja sama di bidang pencegahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal

- "A Tale of Two Institutions: The ARF, ADMM-Plus and Security Regionalism in the Asia Pacific," *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 39, Issue 2 (Aug 2017), hal. 259-264.
- Bonciu, Florin, "Japan and the Challenges of a New Global Reality", *Romanian Economic and Business Review*", Vol. 11, Issue 3 (Fall 2016), hal. 34-43.
- Chau, Andrew. "Security Community and Southeast Asia: Australia, the U.S., and ASEAN's Counter-Terror Strategy", *Asian Survey*, Vol. 48, Issue 4 (July/Aug 2008), hal. 626-649.
- Chow, Jonathan T. "ASEAN Counterterrorism Cooperation Since 9/11", *Asian Survey*, Vol. 45, Issue 2 (Mar/Apr 2005), hal. 302-321.
- Haryani, Silvia. "Kerjasama Kontra-Terrorisme Indonesia-Australia: Perbandingan Antara Masa Pemerintahan Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono", *Jurnal Masyarakat dan Kebudayaan Politik*, Vol. 21, No. 4, 2008.
- Monaco, Lisa. "Preventing the Next Attack: A Strategy for the War on Terrorism", *Foreign Affairs*, New York, Vol. 96, Iss. 6, (Nov/Dec 2017), hal. 23-29.
- Paust, Jordan J. "Terrorism as an International Crime", dalam Giuseppe Nesi (Ed.), *International Cooperation in Counter-terrorism: The United Nations and Regional Organizations in the Fight Against Terrorism*, Routledge, New York, 2016, hal. 25-30.
- Pipe, Carolne Kennedy. "Terrorism Studies: What We Have Forgotten and What We Now Know", *Government and Opposition*, Cambridge Vol. 53, Iss. 2, (Apr 2018), hal. 356-384.
- Roberts, Christopher B., Ahmad D. Habir. "Indonesia-Australia Relations: Progress, Challenges and Potential", dalam C.B. Roberts et al. (eds.), *Indonesia's Ascent: Power, Leadership, the Regional Order*, Palgrave Macmillan, 2015, hal. 195-223.
- Rose, Gregory and Diana Nestorovska. "Towards An ASEAN Counter-Terrorism Treaty", *Singapore Year Book of Internasional Law*, Vol. 9 (2005), hal. 157-189.
- Schmid, Alex P. "The Definition of Terrorism", dalam Alex P. Schmid (Ed.), *The Routledge Handbook of Terrorism Research*, Routledge, New York, 2011.
- Wuryandari, Ganewati. "Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Menghadapi Isu Terorisme Internasional", *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 11, No. 2, Desember 2014.

Portal/Media Online

- "Agreement Between the Republic of Indonesia and Australia on the Framework for Security Cooperation", *dfat.gov.au.*, <https://dfat.gov.au/geo/indonesia/Pages/agreement-between-the-republic-of-indonesia-and-australia-on-the-framework-for-security-cooperation.aspx>, diakses 2 Juni 2018.
- "Antisipasi Anggota ISIS dari Marawi, Pintu Masuk Perbatasan Diperketat", *Kompas.com.*, 19 Oktober 2017, <https://regional.kompas.com/read/2017/10/19/07154561/antisipasi-anggota-isis-dari-marawi-pintu-masuk-perbatasan-diperketat>, diakses 30 Mei 2018.

“BNPT: Pendanaan Terorisme Terafiliasi ISIS Meningkat”, *Mediaindonesia.com.*, 27 September 2017, <http://www.mediaindonesia.com/news/read/124433/bnpt-pendanaan-terorisme-terafiliasi-isis-meningkat/2017-09-27> - diakses 1 Februari 2018.

“BNPT: Waspadai ancaman ISIS dari Marawi”, *Antaraneews.com.*, 23 Mei 2018, <https://www.antaraneews.com/berita/712797/bnpt-waspadai-ancaman-isis-dari-marawi>, diakses 26 Mei 2018.

Hincks, Joseph. “The Battle for Marawi City: What the siege of a Philippine city reveals about ISIS’ deadly new front in Asia”, *Time.com.*, 9 Juni 2017, <http://time.com/marawi-philippines-isis/>, diakses 26 Februari 2018.

“Indonesia, Malaysia dan Filipina Resmi Mulai Kerja Sama Patroli Maritim Terkoordinasi”, *Kemhan.go.id.*, 19 Juni 2017, <https://www.kemhan.go.id/2017/06/19/indonesia-malaysia-dan-filipina-resmi-mulai-kerja-sama-patroli-maritim-terkoordinasi.html>, diakses 26 Mei 2018.

“Kepala BNPT: ISIS Ditetapkan sebagai Organisasi Teroris”, *Beritasatu.com.*, 27 September 2017, <http://www.beritasatu.com/hukum/454976-kepala-bnpt-isis-ditetapkan-sebagai-organisasi-teroris.html> - diakses 31 Januari 2018.

“KRI Sultan Hasanuddin dan KRI Sultan Iskandar Muda Kunjungi Pelabuhan General Santos Filipina Selatan”, *Kemlu.go.id.*, 31 Oktober 2017, <https://www.kemlu.go.id/davaocity/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/KRI-Sultan-Hassanudin-dan-KRI-Iskandar-Muda-Kunjungi-Pelabuhan-General-Santos.aspx>, diakses 28 Mei 2018.

“Resolution 2199 (2015)”, *United Nations, Security Council*, 12 February 2015, <https://www.un.org/press/en/2015/sc11775.doc.htm> - diakses 15 Februari 2018.

Springer, Kyle, “Australia and Indonesia: Strategic Partners in a Time of Change”, *Australian Institute of International Affairs*, 17 April 2018, <https://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/australia-indonesia-relationships-strategic-partners-in-a-time-of-change>, diakses 2 Juni 2018.

“7 Aksi Teror Mematikan Terbesar Sepanjang 2017”, *Kompas.com.*, 23 Desember 2017, <http://internasional.kompas.com/read/2017/12/23/12000001/7-aksi-teror-mematikan-terbesar-sepanjang-2017> - diakses 31 Januari 2018.

Surat Kabar/Laporan/Dokumen

“ASEAN and Australia sign deal to combat terrorism together”, *The Jakarta Post*, 18 Maret 2018, hal. 11.

“ASEAN 6 discuss further cooperation”, *The Jakarta Post*, 5 Februari, 2018, hal. 10.

“Defeating terrorism together”, *The Jakarta Post*, 26 Januari 2018, hal. 11.

“Densus 88 to coordinate with Philippines on arrested Indonesian terrorists”, *The Jakarta Post*, 6 November 2017, hal. 10.

“Duterte declares mission accomplished in Marawi”, *The Jakarta Post*, 17 Oktober 2017, hal. 11.

“Indonesia, Australia sign action plan on m on maritime cooperation”, *The Jakarta Post*, 17 Maret 2018, hal. 11.

“Kemenlu Siapkan 8 Langkah Strategis”, *Media Indonesia*, 10 Januari 2018, hal. 14.

“Letter from the Secretary General to the President of the General Assembly”, dalam *The United Nations Global Counter-Terrorism Strategy*, United Nations: General Assembly, 24 Desember 2015.

“Philippines: The Philippines, Indonesia, and Malaysia Forge Collective Effort Against Terrorism, Extremism”, *MENA Report*, London, 22 Juni 2017.

“Philippines: ‘Battle of Marawi’ Leaves Trail of Death, Destruction”, Washinton, D.C.: *Targeted News Service*, 18 November 2017.

“UN chief warns terrorism ‘unprecedented threat’ to world peace”, *UN News Centre*, 17 November 2017.

Narasumber Wawancara

- Abdullah Sadik S.Ip., Kepala Badan Kesbangpol Kota Ternate
- Bappeda Maluku Utara
- Brigjen TNI Gatot Eko Puruhito, Kabinda Provinsi Maluku Utara
- David Braun, *Political and Public Affairs Branch*, Kedubes Australia
- Fanfan Infansyah, Direktorat Kerjasama Bilateral BNPT
- Irjen Pol. Bambang Waskito, Kapolda Sulawesi Utara
- Danny Mandak ME., Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Sangihe
- Kodim 1301/Sangihe
- Kolonel Laut (P) Anung Sutanto, Asops Lantamal VIII
- Kolonel Laut (P) Rizaldi, Danlanal Ternate
- Kolonel Laut (P) Setiyo Widodo, Komandan Lanal Tahuna
- Kombes Kristono, Kepala Biro Operasi Polda Sulawesi Utara
- Kopol Toni Kasmiri, Wakapolres Pulau Morotai
- Korem 131/Santiago, Manado
- Kris Erlangga, Direktur Kerja Sama Bilateral BNPT
- Laksma TNI Ahmadi Heri Purwono, Komandan Lantamal VIII
- Mayor Inf. Laode Mohamad Sabaruddin, Kasi Ter Korem 152/Babullah
- Mochamad Chanda Widya Yudha, Kemenlu RI
- Nasir Abas, Konsultan Pusat Riset Ilmu Kepolisian dan Terorisme, UI
- TNI AU Lanud Leo Watimena, Morotai